

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua dapat diselesaikan sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 yang mana pada pasal 27 ayat (2), LKPJ ini berisi informasi tentang capaian program dan kegiatan, jumlah dana, keluaran (output), target, realisasi, hasil (outcome), permasalahan dan Solusi

Laporan Kinerja Biro Organisasi Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kinerja pada Biro Organisasi pada masa yang akan datang.

Jayapura, 4 Pebruari 2025



**KEPALA BIRO,**

**LINDA S. ONIBALA, S.Sos.MM**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19720911 199112 2 001**



# DAFTAR ISI

|                       |   |    |
|-----------------------|---|----|
| <b>KATA PENGANTAR</b> | .....   | i  |
| <b>DAFTAR ISI</b>     | .....   | ii |
| <b>BAB I</b>          | <b>PENDAHULUAN</b>  |    |
|                       | 1.1. Latar Belakang .....   | 1  |
|                       | 1.2. Tugas Pokok dan Fungsi .....   | 1  |
|                       | 1.3. Susunan Organisasi .....   | 1  |
|                       | 1.4. Keadaan Pegawaiian.....  | 2  |
|                       | 1.5. Dasar Hukum .....  | 4  |
|                       | 1.6. Visi dan Misi Kepala Daerah.....   | 5  |
|                       | 1.7. Tujuan.....  | 7  |
|                       | 1.8 Sasaran.....  | 8  |
| <b>BAB II</b>         | <b>PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</b>              | 10 |
| <b>BAB III</b>        | <b>HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH</b> |    |
|                       | 3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....                              | 14 |
|                       | 3.2.. Capaian Kinerja Keluaran.....   | 17 |
|                       | 3.3. Analisis Kesesuaian Antara kegiatan dan Target Kinerja.....                | 17 |
|                       | 3.4. Kebijakan Strategi Yang ditetapkan.....                                    | 17 |
|                       | 3.5. Tindaklanjut Rekomendasi DPRP Tahun Anggaran Sebelumnya                    | 21 |
| <b>BAB IV.</b>        | <b>CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN (APBN)</b>        | 22 |
| <b>BAB V</b>          | <b>PENUTUP</b> .....  |    |



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua.

Kedudukan Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua merupakan unsur staf, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui SEKDA (Pasal 42).

## 1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

“merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana.

Untuk melaksanakan tugas pokok Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan pembinaan penataan kelembagaan perangkat daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan tatalaksana pemerintahan dan pembangunan serta analisis jabatan;
- c. penyiapan bahan perumusan pengendalian kinerja;
- d. pelaksanaan ketatausahaan.

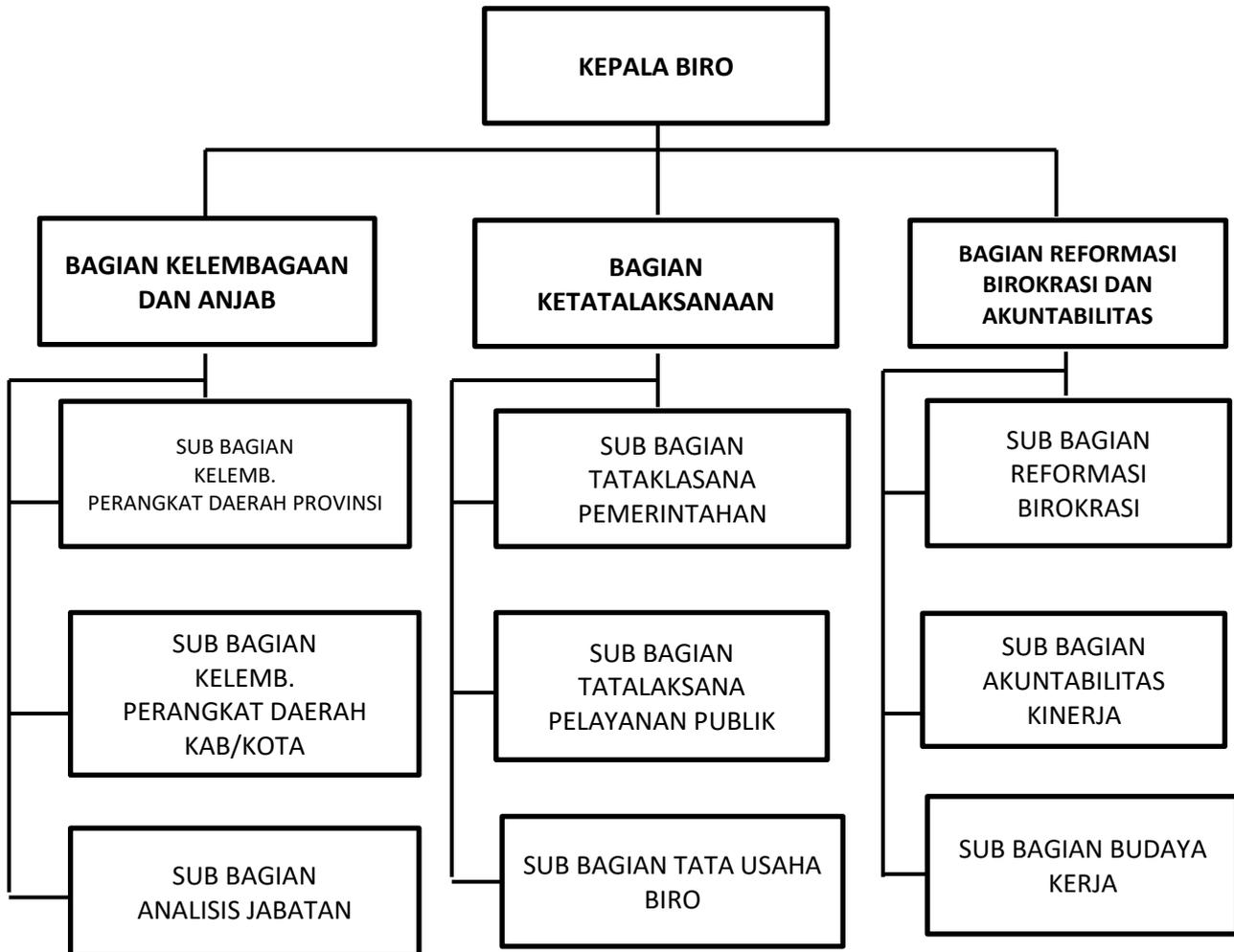
## 1.3. Susunan Organisasi

Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua dibentuk berdasarkan pasal 16 Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 44 Tahun 2020 Biro Organisasi dipimpin oleh seorang Kepala Biro membawahi 3(tiga)Kepala Bagian, yaitu:

Struktur Organisasi Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua dapat dilihat pada TABEL 1 sebagai berikut :

**Tabel 1.1. Struktur Organisasi Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua**

Tabel 1.1



**1.4. Data Umum /Keadaan Kepegawaian**

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penentu dalam mencapai keberhasilan organisasi. Pencapaian kinerja tahun 2024 merupakan wujud nyata atas komitmen yang disepakati, dicanangkan, dan diterapkan secara konsekuen mulai jajaran pimpinan sampai pelaksana.

SDM menurut jenis kelamin adalah :

Laki-laki : 34 (tiga puluh empat) orang

Perempuan : 23 (dua puluh tiga) orang

1.4.1. SDM Menurut jenjang pangkat dan golongan adalah :

Golongan II.a: 1 (satu) orang

Golongan II.b: 6 (enam) orang

Golongan II.c : 2(dua) orang

Golongan III.a : 6 (enam) orang

Golongan III.b : 4 (empat) orang

Golongan III.c : 5 (lima) orang

Golongan III.d : 7 (tujuh) orang

Golongan IV.a : 3 (tiga) orang

Golongan IV.b : 1 (satu) orang

1.4.2. SDM menurut Tingkat Pendidikan adalah :

| NO | Tingkat Pendidikan | Jumlah | Presentase |
|----|--------------------|--------|------------|
| 1  | S2                 | 7      | 9,28       |
| 2  | S1                 | 24     | 51,42      |
| 3  | D3                 | -      | -          |
| 4  | SMA                | 23     | 40,28      |
|    | JUMLAH             | 57     | 100        |

1.4.3. SDM Menurut Eselon :

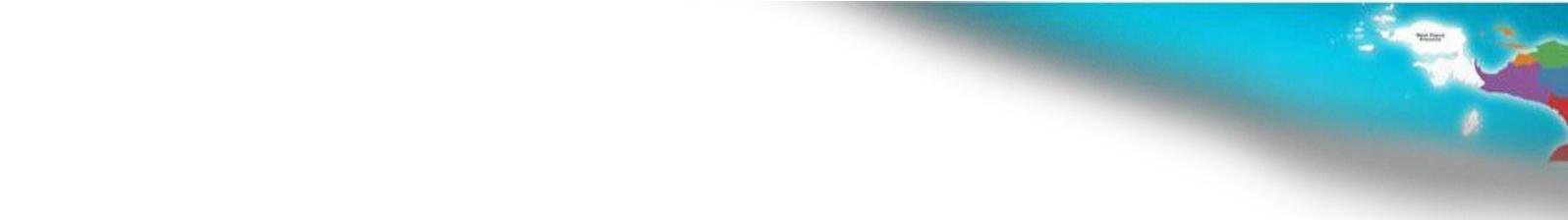
| NO | Tingkat eselon | Jumlah | Jabatan kosong |
|----|----------------|--------|----------------|
| 1  | II.b           | 1      | -              |
| 2  | III.a          | 3      | -              |
| 3  | IV.a           | 9      | -              |

1.4.4. Keadaan Kepegawaian menurut Pangkat/Golongan :

| <b>NO</b>    | <b>GOLONGAN</b> | <b>JUMLAH</b>   |
|--------------|-----------------|-----------------|
| 1.           | Golongan IV/c   | 1 Orang         |
| 2.           | Golongan IV/b   | 1 Orang         |
| 3.           | Golongan IV/a   | 1 Orang         |
| 4.           | Golongan III/d  | 10 Orang        |
| 5.           | Golongan III/c  | 6 Orang         |
| 6.           | Golongan III/b  | 5 Orang         |
| 7.           | Golongan III/a  | 4 orang         |
| 8.           | Golongan II/d   | 2 orang         |
| 9.           | Golongan II/c   | 5 orang         |
| 10           | Golongan II/b   | 1 orang         |
| 11           | Golongan II/a   | 16 orang        |
| <b>TOTAL</b> |                 | <b>57 orang</b> |

## 1.5. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Gubernur Papua Nomor 01 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024;
  7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua;
  8. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua Nomor 4.01.011.08.0004, Tanggal 22 Januari 2024;

#### **1.6. Visi dan Misi Kepala Daerah**

Renstra Biro Organisasi merupakan bagian dari RPD Provinsi Papua Tahun 2023 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 5/2023, Visi Provinsi Papua pada RPJPD yaitu **“Papua yang Mandiri secara Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Politik.”** Dan Misi ke-3 yaitu **“ untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan bebas dari korupsi,** Visi tersebut memiliki keterkaitan dengan prioritas pembangunan tahap IV diantaranya tersambung dari segi kemandirian pada segala bidang, dari 4 (empat) Tujuan pada RPD Tahun 2024-2026 tujuan ke



4 yaitu “**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik**” bersinergi dengan Tujuan pada RENSTRA Biro Organisasi yaitu “**Terwujudnya organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik**”

Tujuan 4: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan sasaran:

1. Meningkatnya akuntabilitas birokrasi otonomi khusus Papua
2. Meningkatnya transparansi penggunaan dana otonomi khusus Papua
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Visi dan Misi serta tujuan diaktualisasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Biro Organisasi berpedoman pada tugas pokok dan fungsi organisasi sebagaimana terdapat dalam Peraturan Gubernur Nomor 44 tahun 2023.

## **Visi dan Misi Gubernur**

### 1.7.1. Pernyataan Visi

Visi pembangunan Provinsi Papua dalam RPD Provinsi Papua adalah yaitu, “ **Untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan bebas dari korupsi**”.

### 1.7.2. Pernyataan Misi

Dalam rangka mewujudkan visi yaitu “ **Untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan bebas dari korupsi**”, Visi tersebut memiliki keterkaitan dengan prioritas pembangunan tahap IV diantaranya tersambung dari segi kemandirian pada segala bidang, dari 4 (empat) Tujuan pada RPD Tahun 2024-2026 tujuan ke 4 yaitu “**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik**”

Berdasarkan visi tersebut Biro Organisasi menetapkan 3 misi yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan TUPOKSI yaitu :

- 2.1.1.1.1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan Analisis Jabatan mewujudkan organisasi Pemerintah daerah yang rasional.
- 2.1.1.1.2. Meningkatkan pembinaan Sistem ketatalaksanaan pemerintahan yang efisiensi dan efektif.
- 2.1.1.1.3. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM aparatur

Tujuan dari pelaksanaan TUPOKSI adalah untuk **“mewujudkan Organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik”**. Dalam pelaksanaan TUSI Organisasi Biro Organisasi mengemban tugas administrasi menata struktur kelembagaan,, menyiapkan perangkat regulasi pelaksanaan pemerintahan juga berperan dalam pembangunan dan penempatan aparatur pada tempat yang tepat/ the rightman on the rightplace.

### 1.7. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai berdasarkan review rencana strategis Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua dalam jangka waktu 1 (satu) anggaran , telah ditetapkan Biro Organisasi yang mengarah kepada kebijakan strategis dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki organisasi, keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :Tabel 2.1 Hubungan Tujuan dan Sasaran

| No | Misi Gubernur   | Tujuan Biro   | Sasaran Strategis Eselon II  |
|----|---|---|--|
| 1  | 2   | 3   | 4  |
| 1  | <b>Untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan bebas dari korupsi</b> | Terwujudnya Organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik | Penataan Kelembagan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran(Richttizing) |
|    |   |   | Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi                                |
|    |   |   | Meningkatnya sistem ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien dan                                 |
|    |   |   | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua                                      |
|    |   |   | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Biro Organisasi Setda Provinsi Papua                           |
|    |   |   | Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Papua dan Kab/Kota se papua               |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | Meningkatnya pelaksanaan budaya kerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota se Papua |
|  |  | Terwujudnya penataan SDM Aparatur yang kompeten dan proporsional                       |

## 1.8. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Biro Organisasi dalam jangka waktu tertentu, penetapan sasaran strategis Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua tercermin dalam Renstra yang diimplementasikan dalam Indikator Kinerja Utama Biro serta Perjanjian Kinerja Biro Organisasi, kesemuanya akan menjadi ukuran keberhasilan atas pelaksanaan program dan kegiatan untuk TA. 2024, Tujuan dan sasaran strategis pada penetapan kinerja sesuai Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada Tabel I berikut :

Tabel 2.2. RKT. BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI  
PAPUA TAHUN 2024

| No | Sasaran Strategis Eselon II   | Indikator Kinerja  | Satuan     | Target 2024 |
|----|---|--|------------|-------------|
| 1  | 2   | 3  | 4          | 5           |
| 1. | Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran(Richttizing) | Persentase Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran. | Persentase | 100         |
| 2. |   | Persentase kelembagaan Kab/Kota sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan                     | Persentase | 100         |
| 3. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi                                 | Persentase UPP Provinsi yang melaksanakan SPP  | Persentase | 100         |
| 4. | Meningkatnya sistem ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien dan proporsional                     | Persentase SKPD yang memahami penggunaan Tata Naska Dinas yang benar   | Persentase | 100         |

|    |  |  |            |     |
|----|--|--|------------|-----|
| 5. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua                        | Persentase SKPD Provinsi yang mengumpulkan/melaporkan LKj/Lakip                            | Persentase | 100 |
|    |  | Persentase Kab/Kota yang mengumpulkan/melaporkan LKj/Lakip                                 | Persentase | 100 |
|    |  | Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi oleh KEMENPANRB                   | Nilai      | BB  |
|    |  | Persentase IKU dan PK SKPD yang terakuntabilitas dan terintegrasi dalam IKU Gubernur Papua | Persentase | 100 |
| 6. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Biro Organisasi Setda Provinsi Papua             | Nilai Evaluasi SAKIP Biro Organisasi Setda Provinsi Papua                                  | Nilai      | A   |
| 7. | Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Papua dan Kab/Kota se papua | Persentase SKPD Provinsi Papua yang melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB)                  | Persentase | 100 |
| 8  | Meningkatnya pelaksanaan budaya kerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota se Papua       | Persentase SKPD yang Provinsi yang mendapat Sosialisasi Budaya Kerja                       | Persentase | 100 |
|    |  | Persentase SKPD yang Provinsi yang mendapat Sosialisasi Budaya Kerja                       | Persentase | 20  |
| 9. | Terwujudnya penataan SDM Aparatur yang kompeten dan proporsional                             | Persentase OPD yang telah memiliki Data Analisis Jabatan                                   | Persentase | 100 |

## BAB II

# PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA)- Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua TA.2019- 2024 Biro Organisasi mendapat plafon anggaran dan realisasi keuangan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Realisasi Pelaksanaan Program Biro Organisasi TA 2019 sd 2024

| NO | INDIKATOR                                 | TA. 2019                      | TA.2020                       | TA.2021                                       | TA.2022  | TA 2023  | TA 2024  |
|----|---|-------------------------------|-------------------------------|---|--|--|--|
| 1  | Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Jumlah Program 4, Kegiatan 24 | Jumlah Program 5, Kegiatan 25 | Jumlah Program 2, Kegiatan 8, Sub Kegiatan 22 | Jumlah Program 2, Kegiatan 8 dan Sub Kegiatan 22 | Jumlah Program 2, Kegiatan 8 dan Sub Kegiatan 26 | Jumlah Program 2, Kegiatan 5 dan Sub Kegiatan 16 |

Tabel

Realisasi Jumlah Anggaran Untuk Mendukung Sasaran Strategis Pada  
RENSTRA

TA. 2023 sd 2024

| No | Nama Program  | TA 2023         | TA 2024         |
|----|---|-----------------|-----------------|
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 8,564,015,539,- | 1.772.143.160,- |
| 2  | Program Penatan Organisasi                            | 14,483,976,205  | 4.090.146.060,- |
|    |   | 28,564,015,539  | 5.205.169.833   |

Tabel  
Realisasi Anggaran Biro Organisasi TA. 2023

| NO | URAIAN                 | JUMLAH ANGGARAN            |                            | Selisih         |
|----|------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
|    |                        | Sebelum Perubahan          | Sesudah Perubahan          | (-/+)           |
| 1. | <b>Belanja Operasi</b> | <b>Rp.20.737.042.150,-</b> | Rp.28.285.805.429,-        | 7.826.973.389,- |
|    | Belanja Pegawai        | Rp.3.546.682.607,-         | Rp.9.266.356.200,-         | 4.416.641548,-  |
|    | Belanja Barang & Jasa  | Rp.8.295.025.704,-         | Rp.18.591.638.406,00<br>,- | -               |
| 2. | <b>Belanja Modal</b>   | <b>Rp. -</b>               | <b>Rp. -</b>               | -               |

Memperhatikan data tersebut diatas pagu anggaran Biro Organisasi Tahun 2023 sebesar Rp..28.285.805.429,- dibanding Tahun 2024 Jumlah anggaran sebesar Rp. 5.241.901.510,- mengalami penurunan sebesar Rp. 23.043.903.919,- , Tahun 2024 Biro mendapat anggaran perubahan sebesar Rp. 1.151.755.450,-, atau 22%, dari anggaran induk dan realisasi belanja TA. 2024 sebesar Rp. 5.205.169.833,-atau (99,30) persen.namun dengan komitmen yang kuat di jajaran Biro Organisasi pelaksanaan TUSI organisasi dalam mencapai target pada RENSTRA TA. 2024-2026 tetap menjadi target utama.Pagu Anggaran TA. 2024 sebagai berikut pada Tabel :

| NO                    | URAIAN                       | JUMLAH ANGGARAN           |                            | Selisih                    |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                       |                              | Sebelum perubahan         | Sesudah perubahan          | (-/+)                      |
| 1                     | Belanja Operasi              | Rp.4.090.146.060,-        | Rp. 5.241.901.510,-        | Rp.1.151.755.450,-         |
|                       | a. Belanja Pegawai           | Rp.                       | Rp.                        | Rp.                        |
|                       | b. Belanja Barang & Jasa     | Rp. 4.090.146.060,-       | Rp. 5.241.901.510,-        | Rp. 1.151.755.450,-        |
|                       | c. Belanja Hibah             | Rp.                       |                            | Rp.                        |
|                       | d. Belanja Bantuan Sosial    | Rp.                       |                            |                            |
| 2                     | <b>Belanja Modal</b>         | <b>Rp.</b>                |                            |                            |
| 3                     | <b>Belanja Tidak Terduga</b> | <b>Rp.</b>                |                            |                            |
| 4                     | Belanja Transfer             | Rp.                       |                            |                            |
| 5                     | Belanja Bagi hasil           | Rp.                       |                            |                            |
| 6                     | Belanja Bantuan Keuangan     | Rp.                       |                            |                            |
| <b>JUMLAH BELANJA</b> |                              | <b>Rp.4.090.146.060,-</b> | <b>Rp. 5.241.901.510,-</b> | <b>Rp. 1.151.755.450,-</b> |

## 2.1. Program

Biro Organisasi melaksanakan 2 Program dari 5 (lima). Kegiatan dan 18 (delapan belas) Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

| No    | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan   | Belanja             |                         |              | SUMBER DANA       |
|-------|--|---------------------|-------------------------|--------------|-------------------|
|       |  | Anggaran            | Realisasi               | %            |                   |
| 1.    | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PAPUA</b>   | Rp. 1.772.143.160,- | <b>1.740.934.604.00</b> | <b>98,24</b> |                   |
| 1.1   | <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>  | Rp. 1.527.161.160,- | <b>1.512.874.604.00</b> | <b>99,06</b> |                   |
| 1.1.1 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Rp. 24.000.000,-    | 24.000.000.             | 100          | Dana Alokasi Umum |
| 1.1.2 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Rp. 520.115.620,-   | 519.582.215.00          | 99,90        | Dana Alokasi Umum |
| 1.1.3 | Penyediaan Bahan/Material  | Rp. 101.320.540,-   | 101.010.000.00          | 99,69        | Dana Alokasi Umum |
| 1.1.4 | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Rp. 236.400.000,-   | 235.922.691.00          | 99,80        | Dana Alokasi Umum |
| 1.1.5 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Rp. 645.325.000,-   | 632.359.698.00          | 97,99        | Dana Alokasi Umum |
| 1.2   | <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>  | Rp. 87.750.000,-    | <b>85.680.000.00</b>    | <b>97,64</b> |                   |
| 1.2.1 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Rp. 63.750.000,-    | 61,680,000,00           | 96,75        | Dana Alokasi Umum |
| 1.2.2 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Rp. 24.000.000,-    | 24.000.000.00           | 100          | Dana Alokasi Umum |
| 1.3   | <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>                                       | Rp. 157.232.000,-   | <b>142.380.000.00</b>   | <b>90,55</b> |                   |
| 1.3.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rp. 157.232.000,-   | 142.380.000.000.00      | 90,55        | Dana Alokasi Umum |

|               |  |                     |                         |              |                   |
|---------------|--|---------------------|-------------------------|--------------|-------------------|
| <b>2.</b>     | <b>PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</b>                                     | Rp. 3.469.758.350,- | <b>3.464.235.229.00</b> | <b>99,84</b> |                   |
| 2.1           | <i>Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan</i>                     | Rp. 2.099.997.450,- | <b>2.098.011.459.00</b> | <b>99,91</b> |                   |
| 2.1.1         | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi                               | Rp. 350.000.000,-   | 349.471.914.00          | 99,85        | Dana Alokasi Umum |
| 2.1.2         | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota                         | Rp. 600.000.000,-   | 599.000.000.00          | 99,83        | Dana Alokasi Umum |
| 2.1.3         | Penataan Analisis Jabatan  | Rp. 1.149.997.450,- | 1.149.539.545.00        | 99,96        | Dana Alokasi Umum |
| <b>2.2</b>    | <b><i>Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja</i></b> | Rp. 1.369.760.900,- | <b>1.366.223.770.00</b> | <b>99,74</b> |                   |
| 2.2.1         | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi                              | Rp. 300.002.000,-   | 297.732.340.00          | 99,24        | OTSUS             |
| 2.2.2         | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja                          | Rp. 299.999.900,-   | 299.999.900.00          | 100          | OTSUS             |
| 2.2.3         | Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja                                      | Rp. 99.999.900,-    | 99.999.900,00           | 100          | Dana Alokasi Umum |
| 2.2.4         | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan                                   | Rp. 300.002.200,-   | 299.799.730.00          | 99,93        | Dana Alokasi Umum |
| 2.2.5         | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik                                | Rp. 369.756.900,-   | 368.691.900.00          | 99,71        | Dana Alokasi Umum |
| <b>JUMLAH</b> |  |                     | <b>5.205.169.833.00</b> | <b>99,30</b> |                   |



## **BAB III**

# **HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

### **3.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan**

Pada Tahun 2024 Biro Organisasi melaksanakan 2 (dua) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 5 Kegiatan, 16 Sub Kegiatan dan Program Penataan Organisasi terdiri dari 2 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan, Capaian pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel terlampir :

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN                 | PERANGKAT DAERAH PELAKSANA | KEBIJAKAN   | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET       | REALISASI                 |              |              | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINJUD REK.DPRD |
|----|-------------------------------------|----------------------------|---|--|--------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|-----------------|
|    |                                     |                            |   |  |              | KEUANGAN                  | %            | KINERJA      |              |                              |                 |
|    | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | BIRO ORGANISASI            | Peningkatan kapabilitas organisasi yang efisien efektif dan akuntabilitas | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   |              | <b>1.740.934.604.00.-</b> | <b>98,24</b> |              | -            | -                            | -               |
|    |                                     |                            |   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  |              | <b>1.512.874.604.00.-</b> | <b>99,06</b> |              | -            | -                            | -               |
|    |                                     |                            |   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | 12 Paket     | 24.000.000.00.-           | 100          | 12 Paket     | -            | -                            | -               |
|    |                                     |                            |   | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  | 15 Paket     | 519.582.215.00.-          | 99,90        | 15 Paket     | -            | -                            | -               |
|    |                                     |                            |   | Penyediaan Bahan/Material  | 22 Paket     | 101.010.000.00.-          | 99,69        | 22 Paket     | -            | -                            | -               |
|    |                                     |                            |   | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | 2471 Laporan | 235.922.691.00.-          | 99,80        | 2471 Laporan | -            | -                            | -               |
|    |                                     |                            |   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 30 Laporan   | 632.359.698.00.-          | 97,99        | 30 Laporan   | -            | -                            | -               |
|    |                                     |                            |   | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |              | <b>85.680.000.00.-</b>    | <b>97,64</b> |              | -            | -                            | -               |
|    |                                     |                            |   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 30 Laporan   | 61,680,000,00.-           | 96,75        | 30 Laporan   | -            | -                            | -               |
|    |                                     |                            |   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 12 Laporan   | 24.000.000.00.-           | 100          | 12 Laporan   | -            | -                            | -               |
|    |                                     |                            |   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |              | <b>142.380.000.00.-</b>   | <b>90,55</b> |              | -            | -                            | -               |
|    |                                     |                            |   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 10 Unit      | 142.380.000.00.-          | 90,55        | 10 Unit      | -            | -                            | -               |

| NO | URUSAN PEMERINTAH AN                 | PERANGKAT DAERAH PELAKSANA | KEBIJAKAN   | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET     | REALISASI          |              |            | PERMA SALAH AN            | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINJUD REK.DPRD |  |  |
|----|--------------------------------------|----------------------------|---|---|------------|--------------------|--------------|------------|---------------------------|------------------------------|-----------------|--|--|
|    |                                      |                            |   |   |            | KEUANGAN           | %            | KINERJA    |                           |                              |                 |  |  |
|    | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH AN | BIRO ORGANISASI            | Peningkatan kapabilitas organisasi yang efisien efektif dan akuntabilitas | <b>PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</b>                              |            | 3.464.235.229.00.- | <b>99,84</b> |            | -                         | -                            | -               |  |  |
|    |                                      |                            |   | <b>Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan</b>              |            | 2.098.011.459.00.- | <b>99,91</b> |            | -                         | -                            | -               |  |  |
|    |                                      |                            |   | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi                        | 42 Dokumen | 349.471.914.00.-   | 99,85        | 42 Dokumen | -                         | -                            | -               |  |  |
|    |                                      |                            |   | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota                  | 1 dokumen  | 599.000.000.00.-   | 99,83        | 1 dokumen  | -                         | -                            | -               |  |  |
|    |                                      |                            |   | Penataan Analisis Jabatan                                       | 42 Dokumen | 1.149.539.545.00.- | 99,96        | 42 Dokumen | -                         | -                            | -               |  |  |
|    |                                      |                            |   | <b>Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja</b> |            | 1.366.223.770.00.- | <b>99,74</b> |            | -                         | -                            | -               |  |  |
|    |                                      |                            |   | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi                       | Dokumen    | 297.732.340.00.-   | 99,24        | Dokumen    | -                         | -                            | -               |  |  |
|    |                                      |                            |   | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja                   | 1 Dokumen  | 299.999.900.00.-   | 100          | 1 Dokumen  | -                         | -                            | -               |  |  |
|    |                                      |                            |   | Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja                               | 40 Laporan | 99,999,900.00.-    | 100          | 40 Laporan | -                         | -                            | -               |  |  |
|    |                                      |                            |   | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan                            | 1 Dokumen  | 299.799.730.00.-   | 99,93        | 1 Dokumen  | -                         | -                            | -               |  |  |
|    |                                      |                            |   | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik                         | 1 Dokumen  | 368.691.900.00.-   | 99,71        | 1 Dokumen  | -                         | -                            | -               |  |  |
|    |                                      |                            |   |   |            |                    |              |            | <b>5.205.169.833.00.-</b> | <b>99,30</b>                 |                 |  |  |



### **3.1.1.1. Capaian Kinerja Keluaran**

Capaian kinerja keluaran urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan yang sudah dicapai merupakan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024, capaian kinerja mencapai 100% dan tidak ada masalah dalam pelaksanaan kegiatan,

### **3.1.1.2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dan Target Kinerja**

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam DPA-SKPD Biro Organisasi merupakan penjabaran dari RPD dan RENSTRA SKPD, oleh karena itu komitmen Pimpinan secara berjenjang untuk pencapaian target ditetapkan, karena tugas Biro Organisasi bukan hanya melakukan fasilitasi peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan fungsi administrasi tetapi juga melaksanakan pembangunan SDM aparatur, penyiapan ASN dalam melaksanakan tugas organisasinya.

#### **a. Kebijakan strategi yang ditetapkan**

Yaitu kebijakan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pada tahun anggaran 2024, kebijakan yang dilakukan terform dalam Tabel berikut “

| NO | KEBIJAKAN STRATEGIS   | DASAR HUKUM  | MASALAH YANG DISELESAIKAN  |
|----|---|--|--|
| 1  | Peningkatan kapabilitas organisasi yang efisien efektif dan akuntabilitas | 1. PERDA Nomor 2 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Papua Nomor 44 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua  | 1. Evaluasi PERDA dan Peraturan Gubernur Papua   |
|    |   | 2. Undang-Undang ASN No. 5 Tahun 2014 pada Pasal 56 dan turunannya.<br>3. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja dan Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan Kebutuhan PNS | 2. ANJAB, ABK, data uraian jabatan, kompetensi jabatan, data formasi jabatan untuk 40 (empat puluh ) SKPD telah tersedia Draft Evaluasi sesuai regulasi PERMENPAN dan RB terbaru. dan<br>3. Tersedia Peraturan Gubernur nomor 13/2021 tentang jenis dan kebutuhan JAFUNG dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua sebanyak 153 jabatan |
|    |   | 4. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik maupun turunannya   | 4. Meningkatkan partisipasi ASN dalam melaksanakan tugas Penataan penyelenggaraan Pelayanan Publik masih yang  |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>masih rendah dengan mengadakan rapat kegiatan Forum Konsultasi public/FKPP yang mengundang SKPD pengampu pelayanan. Untuk itulah hal ini menjadi perhatian bagi semua pihak terutama pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik agar wajib melaksanakan SPP Penyelenggaraan pelayanan.</p> |
|--|--|--|---|

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  | 5.  | <p>5. Melakukan koordinasi secara intens, fasilitasi dan melakukan evaluasi ke SKPD dalam rangka peningkatan pelayanan publik dalam menyampaikan laporan hasil Penyusunan Penyelenggaraan pelayanan publik baik SP, SKM maupun FKP</p> <p>6. Kerja sama antara Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia dengan Kementerian PANRB melakukan evaluasi ke setiap kabupaten/kota</p> |
|  |  | 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | <p>7. Melakukan koordinasi, penguatan kepada SKPD dan Kabupaten Kota dalam memfasilitasi penyusunan LKj</p> <p>8. Membangun komunikasi kepada SKPD dan Kabupaten Kota dalam rangka peningkatan SAKIP</p>  |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | <p>7. PERMENPANRB RI No.3 Tahun 2023 tentang perubahan atas PERMENPANRB RI Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map RB Tahun 2020-2024 serta Evaluasi RB dengan aturan baru yaitu sesuai PERMENPANRB RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi RB</p> | <p>9. Biro Organisasi melakukan sosialisasi kepada SKPd dan Kabupaten Kota terkait perubahan regulasi</p> <p>10.Membentuk Tim Fasilitasi dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Provinsi Papua Tahun 2024</p> |
|--|--|--|--|

b. Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya, yaitu

| No | REKOMENDASI DPRD N-1  | TINDAKLANJUT  | TUJUAN   |
|----|---|---|--|
| 1. | Pelaksanaan tupoksi pada Biro Organisasi sudah sesuai dengan anggaran | Anggaran untuk pelaksanaan TUPOKSI agar digunakan sesuai yang ada | Untuk peningkatan kinerja dan tugas-tugas organisasi |



## **BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN (APBD)**

4.1. Biro Organisasi tidak melaksanakan tugas pembantuan dan penugasan (APBD).

## BAB V PENUTUP

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua TA. 2024, dibuat untuk dapat dijadikan bahan evaluasi laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan/merealisasikan program dan kegiatan serta menjadi bahan masukan bagi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban selanjutnya. Sehingga kinerja Biro Organisasi diharapkan dapat terwujud dengan baik, sesuai dengan sasaran, tolok ukur dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Demikian disampaikan laporan, diucapkan terima kasih.

Jayapura, 4 Pebruari 2025

**KEPALA BIRO,**



**LINDA S. ONIBALA, S.Sos.MM**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19720911 199112 2 001**